

PENCUCIAN CITRA SDM WARISAN KOLONIAL, PELETAKAN PARADIGMA SDM BARU: MUNGKINKAH?*

Oleh: Taufiq Ismail**

Abstract

This article tries to present a new paradigm of human resources, instead of maintaining the old one which is part of colonial heritage. This old paradigm pays more attention or respect to status, rights, and one who is in power. More over this paradigm disregards the importance of education, by giving little attention on it especially in matter of fund. By eliminating many of these outdated ideas, the Indonesians have to work hard to create the new one by respecting the local genius ideas, best tradition, religion and creating the new paradigm which pays respect to the process education instead of the result only. The new paradigm pays more attention to poor, and the needy ones, the duties of the leaders, and providing enough fund to the education.

طرح الباحث نموذجا تحليليا جديدا لتنمية الموارد البشرية بديلا عن النموذج الموروثة من قبل المستعمرين الذي تفضل الحالة الاجتماعية والحقوق النفسية، والمكانة الكريمة للسلطين وفي الحين تحمل الجانب الأساسي التي يرتبط بالتمويل التربوي. والنظرة الجديدة لهذا النموذج التي كانت طبيعتها منبثقة من التراث الشعبي وعادتهم الكريمة تحتاج إلى عمل جدي ومنتظم لتحسين الحالة الاجتماعية والمالية للمدرسين باعتبارهم رواد التربية الذين قاموا في الصف الأول. وانطلاقا من هذا النموذج التي كادت طبيعتها مندثرة من دائرة المجتمع يحتاج إلى فتح عيون الحكومة لحفظها ورعايتها.

Kata kunci: pendidikan, sumber daya manusia, dan paradigma baru

* Semula tulisan ini merupakan pidato Dies Natalis ke 41 Universitas Negeri Yogyakarta. Pidato Taufiq ini disajikan pada Sabtu 21 Mei 2005, di Auditorium UNY, di Jalan Kolombo Yogya.

** Sekalipun lulusan dr. hewan, Taufiq Ismail lebih dikenal sebagai seorang sastrawan. Berbagai karya sastra yang telah dihasilkan telah membawanya ke berbagai negara, termasuk AS dan negeri jiran Malaysia. Berbagai prestasi yang dicapainya ini telah membuat sastrawan ini diberi gelar kehormatan Dr. (HC) di bidang Pendidikan Sastra oleh UNY. Dalam rangka penerimaan Dr. (HC), di depan Rapat Terbuka Senat UNY pada Sabtu 8 Februari 2003, Taufiq Ismail menyajikan "Agar Anak Bangsa Tak Rabun Membaca, Tak Pincang Mengarang", yang memukau para pendengar, seperti halnya pidato Dies

A. Pendahuluan

Tema kita hari ini adalah “Implementasi Sistem Pendidikan Nasional dalam Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani.” Dua perkara utama yang diisyaratkan oleh judul di atas. *Pertama*, implementasi sistem pendidikan nasional (di dalamnya tersirat dua persoalan, yaitu (1) penerapan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan (2) isi, muatan apa saja yang terkandung dalam Sisdiknas itu sendiri) dan *kedua*, peningkatan profesionalisme sumber daya insani mengandung tiga persoalan, yaitu (1) peningkatan profesionalisme, (2) pengertian dan sasaran yang hendak dicapai oleh seorang profesional yang menempatkan sebuah profesi apa pun sebagai sarana mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidup, dan (3) perkara sumber daya-insani,¹ yang lazim disebut sumber daya manusia, SDM. Untuk selanjutnya saya menggunakan istilah Sumber Daya Manusia (SDM).

Datanglah pertanyaan ini: siapa pelaku semua itu dan untuk tujuan apa? Sumber segala persoalan ini pastilah manusia. Sedang persoalan yang dihadapi manusia itu terus mengalir tiada henti, timbul-tenggelam dan muncul lagi, berkelok-kelok, dan bercabang-cabang. Pada akhirnya segala persoalan itu sampailah pada sebuah muara yang juga bernama manusia. Jadi, segala masalah manusia itu, sumber dan muaranya satu: manusia itu sendiri. Manusialah yang menciptakan masalah dan manusia pula yang seolah-olah hendak menyelesaikan masalahnya, padahal ketika dia menyelesaikan satu masalah, dia sebenarnya justru melahirkan masalah baru. Kata seorang filsuf, “kehidupan adalah rangkaian masalah. Menyelesaikan masalah yang satu berarti siap menghadapi masalah berikutnya.”

Meskipun masalah manusia itu bersumber dan bermuara sama, yaitu manusia, masalah yang melatarbelakanginya dan tujuan yang melatardepaninya pastilah sangat bergantung pada konteks sosial budaya sejarah manusianya itu sendiri. Bukankah manusia Indonesia berbeda dengan manusia Jepang, Amerika, atau bangsa lain yang mempunyai sejarah, budaya, kepercayaan, sikap dan pandangan hidup yang masing-masing berbeda? Inilah perkara hakiki yang patut dicermati benar ketika kita membicarakan manusia sebagai sumber daya.

Ketika kita membicarakan implementasi Sisdiknas yang dikaitkan dengan SDM, ketika itulah kita seyogianya melihat konteks manusianya dalam perspektif yang lebih mendasar. Begitu juga ketika kita membicarakan peningkatan profesionalisme SDM, kita mesti menempatkannya dalam konteks manusia Indo-

¹ Istilah Sumber Daya Insani digunakan H. Achmad S. Ruky (2003), *SDM Berkualitas: Mengubah Visi Menjadi Realitas*, Jakarta: Gramedia, p. 8. Dia berpendapat, bahwa istilah Sumber Daya Insani lebih tepat sebagai pengindonesiaan istilah Inggris, *human resource*. Istilah itu dapat disandingkan dengan istilah sumber daya yang lain yang dimiliki suatu negara, yaitu sumber daya alami (*natural resources*). Sayangnya, dalam uraian Ruky selanjutnya, istilah Sumber Daya Insani tidak digunakan lagi dan memilih memakai istilah Sumber Daya Manusia (SDM). Judul bukunya sendiri menggunakan istilah SDM, dan bukan SDI. Se jauh pengamatan penulis, buku-buku yang lain, juga menggunakan istilah SDM.

nesia. Pertimbangannya, antara lain, bahwa manusia Indonesia dilahirkan dan dibesarkan dalam budaya masyarakatnya yang berbeda dengan budaya dan masyarakat bangsa lain. Aspek sosio-budaya inilah yang mestinya diikuti menjadi salah satu parameter untuk dicoba memahaminya sebagai sumber daya atau modal. Di samping itu, bagaimanapun juga, manusia bukanlah sekadar makhluk ekonomi atau makhluk sosial semata-mata. Bukankah di sana melekat juga problem budaya, ideologi, dan *nation building* yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Tentulah masih banyak alasan yang dapat kita ajukan. Tetapi, setidaknya-tidaknya, perkara SDM mesti juga dilihat dari perspektif yang lain – yang lebih substansial dan lebih mendasar.

B. Masalah Mendasar

Berpuluh, bahkan mungkin beratus buku telah membicarakan perihal SDM, yang berkembang sebagai ilmu yang maju. Sebagai konsep, teori, analisis, dan kajian, niscaya semua itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang potensi manusia, pemanfaatan dan pengembangan potensi, usaha peningkatan kualitas, dan kebermanfaatannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan manusia. Mengingat manusia sebagai makhluk ekonomi, dan dalam dunia modern, manusia telah terjerat oleh berbagai macam kebutuhan – primer, sekunder, tersier – yang menciptakan ketergantungan antar sesamanya. Semua itu pasti juga berguna bagi sistem manajemen dan operasionalisasinya di berbagai perusahaan, instansi, institusi, atau mungkin juga dalam perencanaan SDM birokrasi pemerintahan. Tidak diragukan lagi, berbagai tulisan tersebut menjadi sangat akademis. Dan itu tentu saja bermanfaat untuk ajang diskusi keilmuan di dunia akademik.²

Problem mendasar SDM Indonesia sesungguhnya berkaitan dengan sikap, mental, tata nilai, orientasi, pandangan hidup, dan kebudayaan yang melatarbelakangi dan melahirkannya. Ia berkaitan erat dengan sejarah pembentukan *nation* bangsa ini.

Mochtar Lubis secara pedih mengemukakan ciri-ciri manusia Indonesia yang antara lain, (1) munafik, (2) segan dan enggan bertanggung jawab, (3) berjiwa feodal, (4) percaya tahayul, (5) artistik, (6) berwatak lemah (cengeng), (7) tidak hemat, (8) kurang gigih, (9) dan tidak terbiasa bekerja keras.³ Ia masih memerinci lebih lanjut tentang sejumlah ciri negatif manusia Indonesia. Meski di sana-sini ada juga ciri

² Sejumlah buku yang membicarakan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian besar hanya menempatkannya dalam kerangka ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dua buku di antaranya, yaitu (1) *Pengembangan Kualitas SDM dari Perspektif PIO* (Depok: Bagian PIO Fakultas Psikologi UI, 2001), sebuah kumpulan artikel yang dieditori Bertina Sjahbadhyni, B.K. Indarwahyanti Graitto, dan Rufus Patty Wutun menyorotinya dari aspek psikologi, dan (2) *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam* karya A. Qodri Azizy (2004), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, menempatkan SDM dalam konteks ajaran Islam. Dengan demikian, kedua buku ini memberi perspektif lain dalam melihat dan menempatkan SDM.

³ Mochtar Lubis (1977), *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Jakarta: Idayu Press. Dikutip

positifnya, setidaknya-tidaknya apa yang dikatakannya sebagai kecenderungan umum yang melekat dalam diri manusia Indonesia. Tentu saja kita boleh setuju atau boleh tidak setuju atas pandangan itu. Tetapi pertanyaannya: dari mana Mochtar Lubis punya pandangan seperti itu?

Ternyata, beberapa hal yang dikemukakan Mochtar Lubis ada juga kesejajarannya dengan pandangan Koentjaraningrat.⁴ Menurut Bapak Antropologi Indonesia ini, sisi negatif manusia Indonesia berkaitan dengan *mentaliteit* (mentalitas). Menurutnya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan dalam dua bagian besar, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kecenderungan masyarakat pedesaan adalah sikapnya yang komformistis, gotong royong, orientasi ke masa kini, dan bekerja keras dengan tujuan semata-mata untuk makan.

Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa manusia bekerja untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, dan lambang-lambang lahiriah dari kemakmuran. Orientasinya ditentukan oleh masa lampau. Sedangkan dalam hubungannya dengan sesama warga masyarakat perkotaan, mereka berorientasi pada atasan atau pimpinan. Simbol-simbol status menjadi bagian penting bagi masyarakat perkotaan.

Bagi Koentjaraningrat, sikap mental yang seperti itu sesungguhnya sudah sejak lama terbentuk, mengendap dan lengket menempel dalam alam pikiran. Sumbernya adalah sistem nilai budaya yang turun-temurun dalam beberapa generasi. Setelah kemerdekaan, situasi perang dan kekacauan kehidupan sosial budaya, ikut pula mempengaruhi sikap mental masyarakat Indonesia. Menurutnya, sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia, yaitu (1) meremehkan mutu, (2) cenderung mencari jalan pintas (menerabas), (3) tidak percaya diri, (4) tidak berdisiplin, dan (5) mengabaikan tanggung jawab.

Jika diterjemahkan lebih lanjut sikap yang meremehkan mutu dapat kita cermati dari cara manusia Indonesia umumnya yang cenderung mengerjakan sesuatu asal jadi, selesai, dan setelah itu dianggap bukanlah persoalannya lagi. Yang penting, pekerjaan itu dapat selesai, terlepas dari apakah pekerjaannya itu bermutu atau tidak. Jika hasil pekerjaannya itu memuaskan, ya syukur, jika mengecewakan, ya tidak apa-apa. Toh tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sudah selesai. Maka, lihat saja berbagai proyek pembangunan yang dipertontonkan di negeri ini. Jalan-jalan cepat rusak, jembatan ambruk, sekolah-sekolah Inpres cuma dapat bertahan antara empat sampai enam tahun. Itulah hasil pembangunan pemerintah Indonesia selama berkuasa. Memang, tiba-tiba di tahun 1970-an jalan di mana-mana diaspal rata sampai ke

juga oleh A. S. Munandar (2001), "Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional," Bertina Sjahbadhyani, dkk., (Ed.), *op. cit.*, pp. xxiv—xxv.

⁴ Koentjaraningrat (1974), *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia. Lihat juga A.S. Munandar (2001), *op. cit.*, pp. xxiv—xxv.

desa-desa, gedung-gedung berdiri gagah, dan jembatan bertebaran melangkahi sungai-sungai.

Tetapi, semuanya itu tidak bertahan puluhan tahun. Belum habis jari sebelah tangan dihitung, jalanan itu harus ditambal, karena kubangan air bertebaran di sekujur badannya, gedung-gedung itu berwajah kusam, lantainya retak-retak, gugusan perumahan rakyat terpaksa mesti segera *direhab* lantaran rumah tipe 21 dan tipe 36 itu sesungguhnya belum layak huni. Rangkaian cerita pilu ini masih amat panjang, bagaimana kualitas pekerjaan diselesaikan dengan semangat asal jadi. Akibatnya, kita hampir kehilangan kepercayaan pada semuanya, termasuk juga kepada sebagian aparat pemerintah.

Sikap yang suka menerabas, mencari jalan pintas terjadi di hampir semua struktur sosial dan birokrasi. Istilah *main belakang, orang dalam, semua bisa diatur, satu meja satu amplop, urusan diselesaikan dengan cara damai*, sesungguhnya merupakan representasi dari kebiasaan main terabas itu. Dalam hal ini, tujuan atau hasil adalah segala-galanya, meskipun harus melalui proses yang tidak benar. Di sinilah, kebiasaan suap-menyuap tumbuh subur. Keadaan ini kemudian seolah-olah memperoleh legitimasi ketika kita berurusan dengan aparat birokrasi pemerintah. Jangan heran jika seseorang yang hendak mengurus sesuatu di instansi pemerintah, dia harus menyiapkan setumpuk amplop yang akan disebar di sejumlah meja dan ke atas sejumlah tangan. Batas antara suap dan ungkapan terima kasih, sudah sangat sulit dibedakan. Kolusi sudah dianggap sebagai bagian dari pekerjaan, dan orang yang tidak melakukan itu dianggap melawan arus zaman. Dapat dibayangkan sukarnya guru yang bertugas mengajarkan budi pekerti, menyampaikannya kepada siswa-siswanya di kelas tentang fenomena ini.

Sikap tidak percaya diri (*minderwaardig*) hampir merata melekat pada diri sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengagungan yang berlebihan terhadap bangsa Barat termasuk memamah secara membuta-tuli segala sesuatu - teori, konsep, gaya hidup, mode, dari yang ilmiah sampai yang urakan - yang datang dari Barat, sebenarnya merupakan kompensasi dari rasa *minderwaardig* itu. Mengapa bangsa ini cenderung kagum secara berlebihan pada segala sesuatu yang datang dari Barat dibandingkan dengan yang datang dari budaya Timur? Banyak orang yang lebih percaya pada orang Barat dibandingkan pada orang Timur. Jika demikian, di mana pula tempatnya kepercayaan kepada bangsa sendiri?

Sikap tidak disiplin juga hampir merata dalam diri masyarakat kita. Istilah *jam karet*, vonis dapat ditentukan di belakang meja, sidang pleno DPR yang tak pernah lengkap, membuang sampah sembarang, lebih takut kepada polisi dibandingkan kepada peraturan, terlambat dalam pengerjaan banyak hal, *tawuran* yang dilakukan sejumlah anggota DPR, adalah sebagian dari ciri lenturnya disiplin bangsa ini. Taat asas dan konsekuen pada peraturan dianggap bersikap kaku, tidak manusiawi, tidak

bertenggang rasa, dan sok-disiplin. Ia akan menjadi bahan olok-olok dan mungkin sekali akan disingkirkan dari pekerjaan atau jabatan strategis.

Sikap mengabaikan tanggung jawab, tidak amanah, khianat, korupsi massal dan penyelewengan yang dilakukan anggota-anggota DPR dan DPRD, serta penyalahgunaan jabatan adalah beberapa contoh kasus pengabaian terhadap tanggung jawab. Sejumlah contoh lain niscaya akan lebih panjang lagi jika dideretkan di sini.

Kehancuran mentalitas (akhlak) bangsa ini, pernah dirumuskan secara puitik dalam dua larik sajak berikut ini: *Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak # Hukum tak tegak, doyong berderak-derak.*⁵ Pertanyaannya kemudian: mengapa sikap-sikap negatif itu sepertinya telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia? Apakah memang bangsa Indonesia sudah ditakdirkan mempunyai karakter buruk seperti itu? Pasti ada sesuatu yang tak beres dalam proses pembentukan bangsa ini. Dalam konteks itulah kita perlu melacakinya, mencari dan mencoba menemukan akar masalahnya, membongkar sumbernya agar kita dapat mengajukan solusi, atau pemecahan, yang tepat dan menerapkan terapi yang sesuai dengan penyakit kronis yang menimpa bangsa ini.

C. Sejarah yang Kelam: SDM Kaum Terjajah

Membicarakan perihal SDM memang seyogianya menyentuh pula aspek sikap dan mentalitas manusianya. Dan itu berkaitan dengan masyarakat yang membentuk perilaku sosialnya, dengan lingkungan yang mempengaruhi cara pandang dan orientasi, dengan budaya yang ikut menentukan tata nilai, sikap, dan mentalitasnya, dan dengan agama yang menjadi dasar ideologi teologis, norma, moralitas, pandangan hidup, sikap dan perilaku religiusitasnya. Keseluruhannya itu berjaln kelindan lalu mengejawantah dalam bentuk tindak perbuatan yang di belakangnya berkaitan dengan beberapa hal yang disebutkan tadi.

Demikianlah, SDM Indonesia tidaklah terlepas dari persoalan agama, budaya, dan tradisi masyarakat yang menggelinding di dalam proses pembentukan bangsa ini. Ini berkaitan dengan masa lalu, sejarah yang membentuknya. Apabila SDM Indonesia ini ditelusuri ke belakang, nyatalah bahwa hampir semua sikap yang buruk sebagaimana yang disebutkan Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat, penyebabnya berkaitan dengan pembentukan mentalitas bangsa ini di masa lalu. Salah satunya adalah warisan yang ditanamkan penguasa kolonial yang menempatkan bangsa di kepulauan Nusantara ini sebagai bangsa terjajah.

Selama bertahun-tahun sebelum penjajah Barat datang, citra positif bangsa Indonesia tercatat dalam berita perjalanan musafir dari Gujarat, pedagang-pedagang Cina, ulama Timur Tengah, dan para pelayar Portugis. Konon, penduduk di wilayah

⁵ Selengkapnya, ada di dalam antologi puisi Taufiq Ismail (2004), *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia*, Jakarta: Yayasan Indonesia, pp. 19—22.

Nusantara terkenal sebagai bangsa yang telaten dan gigih membangun kemegahan Borobudur dan candi-candi lainnya, piawai mendirikan masjid-masjid agung dengan arsitekturnya yang indah, lincah dalam menjalin kerja sama perdagangan dengan Arab, India, Cina, atau Portugis, dan cerdas berdiplomasi membuka jaringan intelektual Muslim dari Timur Tengah, terus menyebar ke Makasar, Banjarmasin, Betawi, Banten, Palembang sampai Aceh.⁶

Selepas Portugis, Sepanyol, Belanda dan Inggris datang dan menguasai wilayah Nusantara, citra positif bangsa ini dibenamkan sedemikian rupa sebagai bangsa terbelakang, teraniaya, dan pecundang secara fisik dan mental. Bersamaan dengan itu, kedatangan bangsa Belanda (Barat) dicitrakan sebagai juru selamat, mesias yang akan mengangkat bangsa pribumi dari lembah kegelapan menuju cahaya peradaban dan kebudayaan modern.

Jika disimpulkan, SDM di negeri ini, sesungguhnya telah dibonsai, dikerdilkan, dan dicitrakan sedemikian rupa oleh peranan politik kolonial yang kemudian ditiru secara membuta-tuli oleh sekelompok masyarakat yang merasa diri sebagai bagian elit birokrasi kolonial. Sejak abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda berusaha membangun citra positif bagi keberadaannya di Nusantara. *Pertama*, menanamkan pengaruhnya di kalangan para penguasa. *Kedua*, membentuk sikap, gaya hidup, dan cara berpikir para penguasa dalam hubungan dengan birokrasi pemerintahan. Sejak itulah, "*penyusupan pandangan-pandangan Barat ke dalam masyarakat penguasa Jawa mulai*

⁶ Bagaimana pihak kolonial Belanda mengerdilkan peranan para ulama besar kita, seperti Syeikh Yusuf (Makasar), Syeikh Mohammad Arsyad al-Banjari (Banjarmasin), Syekh Nawawi al-Bantani (Banten) sampai ke Hamzah Fansuri (Aceh), tampak dari usaha mereka menempatkan para ulama itu sebagai tokoh-tokoh yang hanya berkuat dalam soal-soal keagamaan (Islam). Dari sebagian besar sumber yang ditulis pihak Belanda, hampir-hampir tak ada yang menyinggung peranan para ulama itu dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan. Para ulama itu seolah-olah hanya berurusan dengan bidang agama dan hidupnya semata-mata diabdikan untuk kehidupan akhirat. Lihat Azyumardi Azra (1995), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan.

Buku ini mengungkapkan peranan para ulama Timur Tengah, dan terutama para ulama di kepulauan Nusantara ini sebagai tokoh-tokoh intelektual, pemikir yang karya-karyanya banyak pula yang menyinggung bidang sosial, politik, pendidikan, dan pemerintahan. Lihat juga politik kolonial Belanda terhadap Islam, sebagaimana yang diungkapkan secara mendalam oleh H. Aqib Suminto (1996), *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES. Secara sistematis Belanda melakukan pemasungan, pembatasan, dan penyusupan melalui lembaga-lembaga peradilan, pendidikan, keagamaan, dan birokrasi pemerintahan.

Meskipun dalam soal agama pemerintah Belanda menyatakan bersikap netral, dalam kenyataannya terjadi diskriminasi yang amat mencolok perlakuan Belanda terhadap Islam. Berbagai ordonansi dan peraturan diberlakukan, seperti Ordonansi Guru Islam (1905) peraturan Peradilan Agama (1882), Pengangkatan Penghulu (1905), Ordonansi Perkawinan (1905, 1929, 1932), Pengawasan terhadap Pendidikan Islam (1905, 1925), Pengawasan terhadap Kas Masjid (1893), dan Pengawasan terhadap Ibadah Haji (1933). Guru-guru Islam juga dikenai wajib lapor secara berkala sambil menceritakan apa saja yang diajarkannya dan berapa jumlah muridnya.

meningkat dengan pembukaan berbagai lembaga pendidikan gaya Barat.⁷ Menanamkan pengaruh dan mengubah cara berpikir dan sikap hidup elit penguasa, dilakukan juga lewat pelibatan mereka dalam birokrasi pemerintahan.

Dari sanalah lahir dua kelompok sosial, yaitu (1) kelompok elit birokrasi dan golongan yang merasa diri sebagai kaum bangsawan, *ambtenaar*.⁸ Dari sana pula kemudian mentalitas feodal melekat sebagai sikap hidup, dan (2) kelompok pegawai rendah yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintah kolonial. Mereka umumnya bekerja dalam kedudukan paling bawah dalam struktur birokrasi pemerintah, seperti opas, mandor, jurutulis, mantri air, mantri hutan atau pegawai administrasi di kawedanan atau kecamatan. Kedua kelompok sosial inilah yang berusaha melanggengkan gaya hidup feodalismenya.

Sementara itu, masyarakat di bawah kedua kelompok sosial itu, yaitu masyarakat kebanyakan, dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah terlepas dari tekanan pihak penguasa, termasuk tekanan dari kedua kelompok sosial di atasnya. Senantiasa mereka itu menjadi pecundang, kalah secara nista, teraniaya secara ekonomi, terbelakang dalam pendidikan, dan terjajah fisik serta psikisnya. Dari keadaan itulah, lahir mentalitas kaum terjajah yang kemudian mengalir terus menjadi tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mentalitas inilah yang sampai sekarang terus melekat, menempel menjadi sikap hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

⁷ Savitri Prastiti Scherer (1985), *Keselarasan dan Kejanggalaan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, terj. Jiman S. Rumbo, Jakarta: Sinar Harapan, p. 43.

⁸ Periksa buku Robert van Niel (1984), *Munculnya Elit Modern Indonesia*, terj. Zahara Deliar Noer, Jakarta: Pustaka Jaya. Buku ini mengungkapkan banyak hal yang melatarbelakangi perubahan sosial di Indonesia pada awal abad ke-20. Salah satu faktor yang memungkinkan munculnya golongan elite pribumi ini adalah melalui jalur pendidikan. Golongan priyayi di Jawa dan menak di Sunda yang bukan keturunan raja, salah satu faktornya lahir dari proses pendidikan itu. Sebagian besar dari mereka kerap menempatkan diri sebagai golongan yang berkedudukan tinggi dan berkuasa. Dalam posisi yang menempati status sosial yang tinggi inilah mereka berusaha menjaga wibawa, pengaruh, dan gaya hidup. Sikap itulah yang lalu memperlakukan masyarakat di bawahnya sebagai orang yang dapat diperlakukan sesuka hati.

Sebuah buku yang melukiskan betapa kehidupan elit priyayi, birokrat, dan kaum menak yang berusaha mempertahankan simbol-simbol statusnya yang pada akhirnya menempatkan rakyat sebagai kaum tertindas, teraniaya dengan mental sebagai kaum terjajah, dapat kita cermati dalam disertasi Nina H. Lubis (1998) yang kemudian diterbitkan sebagai buku berjudul, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

Dalam konteks kehidupan sekarang, sudah tidak pada tempatnya lagi jika masyarakat masih berpandangan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) konon mempunyai masa depan yang cerah, dapat bekerja nyaman dan santai meskipun penghasilannya pas-pasan, dapat menikmati masa pensiunan dengan tenang lantaran punya tunjangan pensiun, dan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah, abdi negara, *ambtenaar*. Citra yang berkaitan dengan status simbol inilah yang melekat di sebagian besar masyarakat kita terhadap PNS. Itulah warisan pandangan kolonial Belanda yang jelas sudah tidak relevan lagi, bahkan menyesatkan.

Dalam masyarakat elit birokrasi tradisional, tradisi pemberian upeti, menjilat atasan, mengusung segala sesuatu dengan pertimbangan *asal bapak (atasan) senang*, dan menekan serta memeras masyarakat bawah untuk kesejahteraan pimpinan, dianggap sebagai perbuatan yang wajar, karena memang *dari sononya* begitu. Para elit birokrasi itu yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kolonial, memperoleh legitimasi kekuasaan karena dia merupakan bagian dari pemerintah yang berkuasa. Dengan kekuasaannya itu, dia dapat menarik pajak, menerima upeti, dan menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Jika terjadi huru-hara, dia juga dapat meminta bantuan pada pemerintah kolonial. Hingga kini, pengaruh tradisi itu seperti terus tumbuh subur di dalam kehidupan birokrasi pemerintahan kita.

Pada zaman Orde Baru, hampir semua pejabat pusat (Jakarta) yang datang ke daerah menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan "Sang Penguasa" yang bisa seenaknya menentukan nasib pejabat daerah. Sentralisme luar biasa dominan. Di masa reformasi, sentralisasi ini diperbaiki dengan desentralisasi, yakni otonomi daerah. Alih-alih menjadi baik, sentralisasi korupsi kini malah menggurita menjadi desentralisasi korupsi. Kini, selepas otonomi daerah diberlakukan, para pejabat di daerahlah yang merasa paling berkuasa dan menempatkan diri sebagai "raja-raja" kecil.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan mentalitas feodal yang lazimnya tumbuh di kalangan aparat birokrasi, mentalitas sebagai kaum terjajah, jauh lebih merata serta terus mengepung pemikirannya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang datang dari Barat, gaya hidup dengan selera konsumtif, dan jeratan hutang melalui berbagai bantuan luar negeri. Mental sebagai bangsa kuli, sebagai kaum terjajah, telah menjadi mental makin berkarat dalam pemikiran sebagian besar bangsa ini.

Dalam hal inilah, pembicaraan mengenai SDM, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencuci bersih kedua mentalitas itu, mengubah paradigma gaya hidup, dan membangun citra dunia pendidikan (ilmu pengetahuan) sebagai kebutuhan yang mutlak dicapai jika berharap memperoleh kemajuan. Tentu saja usaha itu akan memerlukan waktu yang amat lama, seperti juga kolonialisme menanamkan mentalitas itu kepada bangsa Indonesia selama tiga abad mereka bercokol di Nusantara.

Salah satu prestasi luar biasa yang ditanamkan kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia adalah mentalitas sebagai kaum terjajah itu. Tengoklah sejarah masa lalu kita. Belanda secara sistematis - lewat berbagai organnya - terus-menerus tiada henti melakukan pencucian otak bangsa pribumi.

Pertama, melalui struktur sosial masyarakat. Dalam struktur masyarakat waktu itu, kelas sosial yang tertinggi dalam hierarki tersebut ditempati oleh masyarakat Belanda dan kulit putih. Di bawahnya, masyarakat Indo-Belanda. Lalu berturut-turut ke bawahnya, masyarakat Timur Asing (Arab, Cina, dan India), golongan priyayi,

dan terakhir berada dalam posisi terbawah adalah bumiputra yang disebut - dengan nada melecehkan - *inlanders*.⁹ Jika laki-laki *inlanders* atau priyayi mau menikahi wanita bangsa kulit putih atau Indo, maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah meminta persamaan hak ke pengadilan. Bagaimana mungkin bangsa pribumi - tuan rumah - meminta persamaan hak kepada bangsa pendatang, bangsa asing, jika tidak bermaksud menciptakan citra bagi bangsa pribumi sebagai bangsa inferior, terjajah, dan rendah.¹⁰

Kedua, melalui sistem pendidikan. Dibukanya kran pendidikan, terutama selepas pemerintah kolonial Belanda mendapat tekanan melalui politik etis, sesungguhnya sebagai kamufase belaka dari niat mereka mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Didirikannya sejumlah sekolah untuk pribumi jelas dapat dianggap mengangkat citra Belanda sebagai penjajah yang kelak diharapkan tahu membalas budi pada pribumi, sebagaimana yang diamanatkan oleh politik etis.¹¹ Kenyataannya, kebijaksanaan pendidikan kolonial dijalankan secara setengah hati.

Pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai yang tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang (murid) Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekadar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kekuasaan kolonial.¹²

Selain itu, tujuan politik pendidikan kolonial dimaksudkan juga untuk mencetak tenaga menengah bawah untuk mengisi posisi-poisi pekerjaan di berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik. Hal tersebut tampak dari didirikannya sekolah-sekolah di daerah-daerah yang berdekatan dengan pabrik. Dengan beberapa orang penduduk pribumi

⁹ Robert van Niel (1984), *op. cit.*, pp. 30-33. Menurut van Niel, pada tahun 1900, 98 % pribumi adalah petani, sisanya, 2 % adalah priyayi. Dalam kelompok masyarakat petani, sebagian kecil termasuk para pemilik tanah, sebagian besarnya adalah mereka yang tak memiliki tanah dan bekerja pada pemilik tanah dengan penghasilan berupa padi hasil panen yang besarnya sesuai dengan kesepakatan petani penggarap dengan pemilik tanah.

¹⁰ Untuk memberi legalitas adanya struktur sosial yang seperti itu, pemerintah Belanda membuat sejumlah undang-undang, peraturan, dan ordonansi. Jadi, semacam pengkastaan - pengelompokan strata sosial - yang secara hukum dibenarkan oleh undang-undang.

¹¹ Tujuan politik etis bersifat rangkap, yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan (2) menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda. Kenyataannya, usaha-usaha untuk mencapai tujuan itu sama sekali tidak dilaksanakan. Pembukaan sekolah, misalnya, sebagian besar muridnya berasal dari golongan priyayi. Sedangkan rakyat biasa dibiarkan dalam kebodohan. Usaha meningkatkan kesejahteraan bangsa pribumi, juga sebenarnya hanya ditujukan untuk golongan priyayi. Itupun dilaksanakan setengah hati. Pembukaan lapangan kerja di dalam birokrasi pemerintahan, misalnya, para priyayi itu hanya dapat menduduki pekerjaan sebagai juru tulis, mandor, polisi, sipir, dan opas kantor. Posisi pekerjaan yang lebih tinggi dari itu, tetap dipegang oleh orang Belanda. Lihat Akira Nagazumi (1989), *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, pp. 26-40.

¹² Mestika Zed (1991), "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perspektif Sejarah," dalam *Sejarah*, No. 1, Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia bekerja sama dengan Gramedia, p. 19.

yang dapat menikmati pendidikan rendah itu, sesungguhnya Belanda dapat memperoleh tenaga menengah - yang murah - untuk menjalankan perusahaan-perusahaannya. Jadinya, pendidikan diarahkan agar penduduk pribumi dapat menjadi kuli bagi perusahaan Belanda. Di samping itu, pendidikan bagi kaum bangsawan pribumi, juga membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Perhatikan kutipan-kutipan berikut:

... tingkat uang sekolah tertinggi bagi anak-anak Eropa adalah 8 gulden per bulan. Anak-anak Eropa yang pendapatan orang tuanya kurang dari 150 gulden per bulan diterima tanpa bayar, dan biasanya lebih setengah anak-anak Eropa dikecualikan [dibebaskan, TI] dari pembayaran uang sekolah.

Sebaliknya, anak-anak Jawa harus membayar, [tanpa ada peraturan untuk pengecualian pembayaran] 15 gulden per bulan, hampir dua kali lipat pembayaran tertinggi anak-anak Eropa. Uang sekolah sekali lagi dinaikkan dua kali lipat dari jumlah itu bagi anak-anak Jawa dari golongan menengah dan atas.

Karena besarnya uang sekolah dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan orang tua, untuk dapat diterima, maka orang tua Jawa harus berpenghasilan setidaknya 400 gulden. Jumlah gaji seperti itu adalah sangat jarang [didapatkan] di kalangan Jawa.¹³

Biaya pendidikan yang amat mahal itulah yang dikeluhkan dr. Wahidin Soedirohoesodo,

... oleh karena setiap kesempatan untuk melanjutkan pelajaran senantiasa disertai pengorbanan keuangan yang besar, maka pada kenyataannya pengembangan pengetahuan [pendidikan, TI] telah merupakan milik khusus orang-orang yang paling berada saja.¹⁴

Politik pendidikan kolonial Belanda, selain bertujuan untuk seolah-olah hendak membebaskan bangsa pribumi dari kebodohan, juga mengandung dua tujuan, yaitu (1) melakukan "pembaratan" melalui sekolah-sekolah sekuler, dan (2) menyisihkan kekuatan Islam sebagai sebuah ideologi yang telah mengakar kuat dalam diri sebagian besar penduduk pribumi. Perhatikan dua kutipan berikut yang memperlihatkan hal tersebut:

Bagaimanapun juga, sekolah-sekolah sekuler yang dikembangkan pemerintah [kolonial Belanda] bukanlah hasil pertumbuhan lokal, melainkan hasil manipulasi kebudayaan modern Barat yang berakar pada negeri asal penjajah [Belanda], baik organisasinya, maupun kurikulumnya.¹⁵

Ketika konferensi zending keempat di Batavia tahun 1885, Colijn memberikan formulasi tentang arti pendidikan Barat untuk memecah umat Islam. Ia mengibaratkan kehadiran sekolah-sekolah Barat bagi Islam adalah seperti pergantian dari terik panas matahari ke hujan lebat bagi tanah keras. Hujan itu akan merupakan suatu elemen yang akan membuyarkan kesatuan Islam.

¹³ Savitri Prastiti Scherer (1985). *op. cit.*, p. 44.

¹⁴ Soewardi Soerjaningrat (1981), "Mengenang Wahidin Soedirohoesodo," dalam Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan, *Cahaya di Kegelapan*, Jakarta: Jayasakti, pp. 11-24. Artikel ini aslinya berbahasa Belanda dimuat dalam *Nederlandsch Indie Oud en Nieuw I (1916-1917)*, p. 265.

¹⁵ Philip G. Albach and Gail P. Kelly (eds.) (1978), *Education and Colonialism*, New York: Longman, p. 4. yang dikutip Mestika Zed (1991), *op. cit.*, p. 20.

Kekompakan dan kekerasannya akan berantakan.¹⁶

Disadari betul, bahwa pendidikan akan sangat berpengaruh bagi lahirnya kesadaran bangsa pribumi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia waktu itu, terlalu amat sedikit masyarakat yang dapat menikmati pendidikan.

Ketiga, melalui kurikulum di sekolah. Seperti dikatakan Abdoel Moeis,¹⁷ di semua peringkat sekolah, pelajaran sejarah bangsa Timur (Abdoel Moeis menyebutnya sebagai pelajaran pengetahuan alam), sama sekali tidak diberikan, apalagi pelajaran sejarah bangsa pribumi. Para pahlawan Belanda, Eropa, atau Amerika diajarkan begitu mendalam dan luas, memukau, dan mengagumkan, sementara nama-nama Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, tidak pernah disinggung sedikit pun. Bahkan, para pahlawan Indonesia itu disebutnya sebagai pemberontak. Dengan begitu, muncul citra bangsa Barat yang ditaburi para pahlawan, sementara para pahlawan pribumi, ditenggelamkan.

Hal yang sama diberlakukan dalam mata pelajaran geografi. Secara meyakinkan, seorang guru Belanda akan menerangkan berbagai kota di Negeri Kincir itu, berikut asal-usul penduduknya, jalan-jalan, parit, sungai, laut, pabrik-pabrik, pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan, pelabuhan dan bandara, batas-batas negara, serta berbagai hal yang mengungkapkan seluruh isi negeri di bawah laut itu, dengan menggunakan peta berukuran raksasa, dua kali tiga meter. Tetapi, ketika guru berkebangsaan Belanda itu menerangkan pulau-pulau di Indonesia, dia akan menggunakan peta Indonesia berukuran mini, satu kali dua meter. Bisa dibayangkan, bagaimana tiba-tiba Nederland yang luas wilayahnya tidak lebih besar dari sebuah propinsi di Indonesia - sebutlah Jawa Barat - bisa melahirkan citra (*image*) sebagai negara yang luasnya dua kali lipat dari Indonesia? Itulah yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Pencitraan menjadi bagian penting. Dan dunia pendidikan salah satu salurannya untuk membangun dan menciptakan citra itu.

D. Mentalitas Ambtenaar, Mentalitas Pegawai Negeri

Dari uraian di atas, sedikitnya ada dua hal mendasar yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia, yaitu melalui pemanipulasian pendidikan dan pemutarbalikan citra. Artinya, masalah pendidikan merupakan bagian penting dalam memberi penyadaran atas kualitas dan elan sebuah bangsa. Dan pihak kolonial Belanda memanfaatkannya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan di negeri jajahan, dan bukan untuk menjadikan bangsa

¹⁶H. Aqib Suminto (1996), *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES, (Cetakan III, Cet. I, 1985), p. 45.

¹⁷Abdoel Moeis (1981), "Nasionalisme," Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan (Ed.), dalam *Permata Terbenam*, Jakarta: Aksara Jayasakti, p. 79-85. Artikel Abdoel Moeis ini aslinya berjudul "Perasaan Tjinta pada Bangsa dan Tanah Air, Nasionalisme," dimuat di surat kabar *Neratja*, 16 Oktober 1917.

pribumi dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, melalui berbagai perangkatnya, penciptaan stratifikasi sosial, pengekangan terhadap apapun yang berkaitan dengan Islam, dan melalui kurikulum di dunia pendidikan, pihak kolonial Belanda menciptakan dan membangun citra dirinya sebagai bangsa yang besar dan maju, superior, modern, beradab dan berbudaya tinggi. Melalui berbagai perangkatnya itu pula, pihak kolonial Belanda menciptakan dan membangun citra yang sebaliknya terhadap bangsa pribumi. Jadilah bangsa pribumi muncul dengan citranya yang serba negatif: terbelakang, miskin, bodoh, tidak beradab, inferior, pasrah terhadap nasib, dan menikmati statusnya sebagai manusia kuli.

Itulah latar belakang sejarah budaya SDM Indonesia yang kemudian sisi negatifnya tercermin dari mentalitas sebagaimana yang dikemukakan Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat. Jika kedua empu itu - Kuntjaraningrat dan Mochtar Lubis - membuat perincian tentang sikap dan mentalitas negatif orang Indonesia, maka prestasi yang diperlihatkan kolonial Belanda dapat kita lihat dari representasi masyarakat yang begitu silau dan tersihir oleh apapun yang bersifat fisik: simbol-simbol status, kemewahan, konsumtif, dan hasrat untuk memperoleh segalanya secara serba instan, serba segera.

Sebuah penelitian yang dilakukan organisasi profesi dengan latar belakang psikologi, bernama Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atas pegawai negeri sipil di sebuah lembaga tinggi negara,¹⁸ memperlihatkan betapa mentalitas para pegawai di sana nyaris tidak berbeda jauh dengan mentalitas para *ambtenaar* dan elit birokrasi pada zaman kolonial Belanda. Bagaimana mungkin para pegawai - yang menjadi responden dalam penelitian itu - yang berpendidikan relatif memadai (setingkat sarjana 78,47 %, master atau magister 9,62 %, akademi 5,38 %, dan SLTA 6,53 %) dengan intelegensi di atas tingkat rata-rata, kurang (tidak) memiliki *sense of competence* dan *sense of personal control*.

Jika sebagian besar pegawai itu tidak memiliki kedua hal tersebut, lalu atas dasar kualifikasi, kapasitas, dan kapabilitas apa mereka memilih pekerjaan di lembaga itu, jika bukan atas dasar simbol status dan asal menjadi pegawai negeri? Tidak ada kesadaran profesionalisme dalam diri para pegawai itu. Mereka bekerja dengan satu tujuan, yaitu naik pangkat untuk meningkatkan karier. Jadi, tak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas pekerjaan. Maka, menjadi sangat wajar jika sebagian besar pegawai itu menyatakan bahwa pelatihan pegawai semata-mata sebagai keharusan agar dapat naik pangkat dan meniti karier yang lebih tinggi, meskipun pelatihan itu sesuai dan disadari dapat menunjang dengan bidang pekerjaannya. Tetapi, jika pelatihan itu tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, mereka ikut

¹⁸ Urip A. Mokoginta, Bertina Sjahbadhyani, dan B.K. Indarwahyanti Graitto (2001), "Kondisi SDM Sebuah Lembaga Tinggi Negara," Bertina Sjahbadhyani, dkk, *op. cit.*, pp. 317—332.

pelatihan dengan tujuan sekadar untuk kenaikan pangkat.

Kesimpulan penelitian itu akhirnya berhasil mengidentifikasi enam karakteristik yang melekat dalam diri para pegawai Lembaga Tinggi Negara, sebagai berikut:

- (1) *sense of personal control* rendah,
- (2) *sense of self-determination* rendah,
- (3) *sense of trust* rendah,
- (4) kapabilitas belajar belum berkembang,
- (5) sangat lambat dalam bereaksi (*slow-starter*), dan
- (6) toleransi terhadap ambiguitas cukup memadai.¹⁹

Karakteristik yang juga menjadi ciri elite birokrat, *ambtenaar*, tampak pula dari minat mereka pada bidang pekerjaan. Hampir semua responden itu menyatakan bahwa mereka berkeinginan menjadi *auditor*, ‘pemeriksa’ satu bidang pekerjaan yang tersirat mencerminkan sebuah kuasa untuk memeriksa apapun. Auditor akan sangat disegani lantaran jabatannya, dan bukan lantaran kapasitas dan kualitas pekerjaannya. Bukankah model pekerjaan ini melekat dalam diri elit birokrat - *ambtenaar* - zaman kolonial?

Penelitian itu boleh jadi tidak mewakili karakteristik Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara keseluruhan. Tetapi, jika di lembaga tinggi negara saja, karakteristik para pegawainya seperti itu, bagaimana dengan pegawai negeri sipil yang bekerja di departemen, pemerintahan daerah, kepolisian atau lembaga-lembaga di bawahnya? Jadi, jika banyak pihak berkeluh-kesah tentang etos kerja PNS, sementara masyarakat umum berharap agar mereka dapat masuk dan bekerja di sana, akar masalahnya lebih disebabkan oleh pandangan kolonial yang masih melekat dalam diri sebagian besar masyarakat kita. Slogan PNS sebagai “abdi negara,” sebaiknya memang diganti menjadi “abdi rakyat”, agar berubah citra sebagian kecil (tapi sangat buruk) PNS yang lebih memperlihatkan wajah sebagai pemerias rakyat. Dengan penggantian slogan itu kiblat berbakti tidak lagi kepada negara, tapi betul-betul digeser berkiblat kepada rakyat.

Lihatlah, bagaimana banyak orang mengecam pelayanan buruk petugas birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat. *Lelet*. lambat dibuat-buat dalam menyelesaikan satu pekerjaan, sering tinggi hati dalam berhadapan dengan publik yang harus berposisi rendah, tak lagi segan-segan atau menyindir, tapi langsung menyebut *uang semir*. Pekerjaan semacam ini toh tetap saja berduyun-duyun dilamar orang, bahkan sampai menyuap ke kiri ke kanan agar diterima dalam formasi. Gejala apakah gerangan ini? Itulah, citra pegawai negeri sebagai *ambtenaar*, gaya elit birokrat

¹⁹ *Ibid.*, p. 331. Dari keenam karakteristik itu, hanya butir enam yang dapat dianggap positif. Tetapi, toleransi itu cenderung digunakan untuk bertenggang rasa pada masalah negatif. Jadi, merebaknya kolusi, misalnya, merupakan bentuk toleransi terhadap ambiguitas itu. Istilah TST (*tabu sama tabu*) sesungguhnya juga merupakan representasi dari toleransi yang dimanfaatkan untuk kepentingan negatif.

yang masih saja melekat dalam sebagian besar masyarakat kita. Pasalnya, konsep bekerja tidak didasari pada profesionalitas. Bekerja bagi kebanyakan orang adalah sebuah kegiatan rutin, datang ke sebuah tempat yang tetap dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian menghasilkan uang dalam jumlah tertentu sebagai jasa melaksanakan tugasnya selama satu bulan. Jumlah itu jelas tidak besar, tidak memadai, tapi peluang untuk mencari yang besar, akan terbuka pada suatu hari. Itulah cara berpikir *ambtenaar* yang menuntut rutinitas, dan kesetiaan. Di sana tak ada konsep profesionalitas, tak ada apresiasi atas kreativitas.

Itulah sebagian kecil dari problem SDM kita. Pencitraan dan pemanipulasian yang dibangun pemerintah kolonial, rupanya terlalu kuat menempel dan berkarat dalam alam pikiran kolektif masyarakat kita. Oleh karena itu, pemberdayaan SDM Indonesia, pertama-tama harus dimulai dari *pencucian kembali pandangan serta nilai kolonialistik yang lama lekat di tubuh bangsa, yang penuh manipulasi dan kamufase itu*. Dengan kesadaran itulah, kita dapat mengawali sebuah babak baru, paradigma baru atau cara berpikir baru dalam memandang SDM kita secara proporsional. Dalam hal ini, tidak berlebihan jika kita menempatkan konsep SDM berdasarkan hakikat dan fitrah manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, sesama makhluk, alam semesta, dan Tuhan.

E. Ilmu sebagai Potensi Dasar SDM

Pembicaraan bagian ini saya mulai dengan mengutip al-Quran, Surat ar-Ra'd, ayat 11:

"Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (individu), jika kaum (individu) itu sendiri tidak berusaha melakukan perubahan." (QS, 13: 11)

Apa maknanya ayat ini dalam konteks pembicaraan SDM? Pernyataan ayat itu eksplisit menekankan pentingnya makna berusaha bagi sebuah bangsa (atau individu), jika dia hendak memperbaiki harkat, martabat, dan kualitas hidupnya. Artinya, Allah memberi peluang bagi siapa pun untuk mengubah nasib, mengangkat martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi, tentu saja perubahan itu tidak serta-merta datang dari langit lewat serangkaian doa belaka. Harus ada proses. Di dalam proses itulah, pertama-tama yang harus dilakukan manusia adalah meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan kualitas SDM. Bagaimanapun juga, setiap individu manusia mempunyai potensi melakukan perubahan. Paling tidak, melakukan perubahan bagi dirinya sendiri. Potensi inilah yang harus disadari sebagai sumber daya, sebagai kualitas diri, sebagai kekayaan terpendam yang akan menjadi kekuatan jika kita sendiri berusaha menggalinya.

Tidak ada perubahan tanpa tindakan, tanpa perbuatan. Jadi bertindak dan berbuat merupakan syarat mutlak melakukan perubahan. Ia menjadi sunatullah. Alat legitimasi. Sebagai pembenar bahwa perubahan itu logis, masuk akal, dan ada

hubungan sebab-akibatnya (kausalitas). Hubungan sebab-akibat tindak perbuatan dan sarana perubahan adalah proses, meskipun dalam beberapa kasus hasilnya kadangkala memperlihatkan perkecualian.

Jika substansi perubahan adalah tindakan untuk berbuat, maka tak akan ada perubahan pada diri seseorang jika dia hanya diam berkhayal, berharap kejatuhan *boki* dari awan. Konsep *kun faya kun* dalam al-Quran “Jadi, maka jadilah” bagi manusia bukanlah jadi tanpa perbuatan. Jadi, maka jadilah itu, setelah melalui proses perbuatan. Setiap individu diberi peluang melakukan perubahan – minimal bagi dirinya sendiri. Dalam konteks hubungan antar-individu, perubahan itu adalah kompetisi, persaingan mengangkat harkat diri. Oleh karena itulah, konsep khalifah di bumi harus dimaknai sebagai sebuah persaingan, kompetisi bagi setiap individu untuk melakukan perubahan sekecil apapun perubahannya, dengan tetap berada dalam aturan permainan yang benar menurut ketentuan Tuhan.

Tiga jenis manusia yang dapat melakukan perubahan dalam sebuah komunitas atau kaum (bangsa): (1) perintis (inovatif), (2) pemimpin kharismatik, (3) berilmu.

Dalam lingkup yang lebih khusus yang menyangkut seorang individu, setiap manusia pada hakikatnya seorang perintis, sekurang-kurangnya bagi dirinya sendiri, pemimpin, setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri, tetapi belum tentu sarat ilmu dan dapat mempengaruhi khalayak yang lebih luas. Konsep khalifah di bumi sesungguhnya menuntut ketiga hal itu: perintis, pemimpin, dan mempunyai penguasaan ilmu.

Dalam masyarakat tradisional, seorang perintis, inovator, pembaharu, cukup didasarkan pada pengalaman, keterampilan, dan kecakapan. Tetapi, dalam masyarakat modern, tuntutan ilmu menjadi syarat utama.²⁰ Bukankah ada pepatah, bahwa siapa yang menguasai ilmu, dia akan menguasai “dunia”. Itulah yang terjadi dalam masyarakat modern ini. Dalam arus globalisasi, penguasaan ilmu itu bermakna juga sebagai penguasaan informasi. Tanpa itu, dia akan tergusur dan tenggelam di bawah bayang-bayang mereka yang menguasai ilmu dan informasi. al-Quran menegaskan;

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadilah, 11).

Selanjutnya, ayat pertama yang diturunkan Allah, “*Iqra’ ...*” juga implisit merupakan perintah untuk mencari ilmu. Dengan demikian, mencari ilmu (pengetahuan) sesungguhnya merupakan kewajiban manusia. Walau kita balik-balik halaman Al-Quran secara acak, dalam lembaran itu, kita akan menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi, jelas, Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan bagi manusia di muka bumi

²⁰ C.A. van Peursen (1976), *Strategi Kebudayaan*, Jakarta/Yogyakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius, p. 178-191.

ini, laksana pintu masuk untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan kualitas itu pula, dia berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan manusia lainnya yang tidak berilmu.²¹ Jadi, salah satu esensi SDM bagi Islam adalah ilmu.

Dalam masyarakat tradisional, SDM menuntut dua hal, yaitu (1) kecakapan atau keterampilan, dan (2) pengalaman. Sedangkan dalam masyarakat modern, SDM menuntut tiga hal, yaitu (1) kecakapan atau keterampilan, (2) pengalaman, dan (3) pengetahuan (ilmu). Dari ketiga hal itu, jika kita hanya mempunyai kecakapan atau keterampilan, kita akan sampai pada keahlian seorang praktisi, atau tukang. Sementara itu, pengalaman tanpa keterampilan dan ilmu, hanya akan mengantarkan seseorang matang dalam bidang tertentu, tetapi belum tentu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri secara cepat. Ia tergolong manusia *slow-starter*. Dalam hal itulah, penguasaan ilmu sekaligus akan mengatasi keduanya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, fondasi utamanya harus didasarkan pada penguasaan ilmu. Dengan cara itu, proses belajar keterampilannya akan menjadi lebih mudah, dan bersamaan dengan itu, sekaligus juga mempunyai pengalaman tentang bidang yang bersangkutan.

Sejarah telah mencatat, perjalanan peradaban Barat terutama selepas masuknya kekayaan intelektual dunia Muslim seperti membuka jalan bagi tumbuhnya kesadaran pentingnya peranan ilmu pengetahuan. Puncaknya terjadi pada zaman rasionalisme yang selalu memberi tempat pada segala sesuatu yang harus dapat dijelaskan atas dasar akal sehat, rasio, dan logika. Segala sesuatu harus memenuhi tuntutan rasionalitas.²² Cara pandang inilah yang sampai sekarang kemudian menjadi salah satu bagian dari tradisi intelektual Barat.

Dalam perjalanan selanjutnya, terbuktilah pengetahuan itu sesungguhnya salah satu aspek kekuasaan. Tetapi, pendewaan terhadap rasio, tanpa dibarengi kesadaran beriman, hanya akan menghasilkan manusia yang menolak keberadaan Tuhan, atau manusia yang tak perlu memikirkan nilai-nilai spiritualitas agama. Kalimat Einstein amat tersohor bahwa “sains tanpa agama itu buta, agama tanpa sains itu pincang.” Itulah yang terjadi pada zaman rasionalisme, saat golongan gereja membunuh para ilmuwan, sementara para ilmuwan tidak hanya menolak peranan gereja, tetapi juga menafikan keberadaan Tuhan.²³

Mari kita menoleh ke Jepang. Perkembangan Jepang hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini tidak terlepas dari kesadaran mereka akan pentingnya ilmu untuk mencapai kemajuan, untuk mengejar ketertinggalan. Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang sesungguhnya merupakan kebangkitan kembali negeri Sakura itu pada kesadaran akan ilmu. Sebelumnya, pada zaman Edo, memang mereka hidup dalam

²¹ Kaitan ilmu dan SDM, dibahas sangat baik oleh A. Qodri Azizy (2003), *op. cit.*, pp. 85-124.

²² Keith Wilkes (1982), *Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Sinar Harapan.

²³ *Ibid.*, pp. 85-109.

kemapanan di bawah kekuasaan Tokugawa. Dengan politik isolasinya, Jepang merasa bisa hidup tanpa harus melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain. Belakangan, ketika beberapa armada asing - terutama armada Amerika - datang dengan persenjataannya yang lebih modern, Jepang tak sanggup lagi bertahan. Kekalahan itu memaksanya menandatangani Perjanjian Kanagawa, sebuah perjanjian Persahabatan Amerika-Jepang (*Nichiben Washin Joyaku*) yang isinya sangat merugikan pihak Jepang. Dari sana muncul kesadaran pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka, awal memasuki zaman Meiji, Jepang mengirimkan begitu banyak ilmuwan ke berbagai negara maju. Ketika mereka kembali ke Jepang, para ilmuwan itu mengembangkan sendiri ilmunya untuk kepentingan negara dan bangsanya. Hampir semua buku asing yang datang ke Jepang, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan cepat. Ilmu eksakta, kedokteran, sosial-budaya, sastra, filsafat, dan ekonomi, bersama-sama maju pesat. Hasilnya adalah lompatan jauh ke depan. Jepang menjadi sebuah negara terkuat di Asia. Konflik Perang Dunia telah menyeret Jepang melakukan serangkaian invasi ke berbagai negara tetangganya. Cina, Rusia, bahkan Amerika, diserbunya. Kawasan Asia Tenggara, ditaklukkan dan dijarahnya. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang terpaksa mengakhiri petualangannya.

Apa yang dikatakan Kaisar Jepang waktu itu saat dia melihat ribuan korban jatuh dan kedua kota itu rata dengan tanah? "Tinggal berapa orang lagikah guru yang masih hidup?" Itulah pertanyaan pertama yang dilontarkan seorang kaisar ketika melihat bangsanya hancur oleh kekuatan mahadahsyat. Mengapa guru yang ditanyakannya, dan bukan tentara, pejabat pemerintah, hakim, atau seniman? Kenapa guru? Itulah ekspresi seorang kaisar (pemimpin) yang sangat menyadari, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Guru adalah ujung tombak yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu berkembang subur dan menyebar memasuki segenap alam pikiran warga bangsanya. Guru adalah sumber pengetahuan yang mengantarkan seorang anak manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Gurulah yang sebenarnya akan mengantarkan segala bangsa mencapai kemajuan. Pertanyaannya kini: Mengapa bangsa Indonesia masih juga terpuruk? Adakah yang salah pada diri para guru kita? Di mana letak kesalahannya?

F. SDM dengan Perspektif dan Paradigma Baru

Berdasarkan uraian di atas, tampaklah bahwa problem utama SDM kita menyangkut dua hal: (1) problem budaya yang ditanamkan pihak kolonial Belanda secara keliru, dan (2) problem lemahnya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kemajuan dan mengejar ketertinggalan. Maka, langkah yang sangat mendesak harus dilakukan adalah pencucian cara pandang kolonial yang masih melekat dalam diri sebagian besar warga masyarakat kita.

Dalam usaha mencuci bersih peninggalan kolonial Belanda sehubungan dengan SDM kita, beberapa hal berikut ini, kiranya patut dipikirkan.

Pertama, melalui pemberian penghargaan pada profesi. Perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa profesi apa pun pada hakikatnya adalah pekerjaan. Dengan cara itu, orang tidak akan menilai orang lain dari jabatan, kedudukan, pekerjaan, melainkan dari profesinya. Bukankah profesi dokter, polisi, politikus, dosen, hakim, petinju, petani, buruh, sopir, pembantu rumah tangga, atau profesi apapun yang tidak melanggar norma agama, hukum, dan susila, pada hakikatnya sama sebagai sebuah pekerjaan yang halal dan sah. Lalu, mengapa harus ada perbedaan bahwa profesi yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain? Itulah pandangan kolonial yang melihat apapun dengan cara pandang stratifikasi sosial dan diskriminatif.

Tumbuhnya kesadaran bahwa profesi adalah pekerjaan, tidak hanya akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap konsep pekerjaan, melainkan juga akan menumbuhkan apresiasi yang sama terhadap profesi apapun, sejauh tidak melanggar norma agama, hukum, dan susila. Maka, seorang majikan tidak akan memperlakukan pembantu rumah tangganya secara sewenang-wenang karena dia mempunyai kesadaran bahwa profesi sebagai pembantu pun adalah pekerjaan yang menuntut profesionalitas, dan bukan sekadar setia dan loyal. Seorang petani yang mempunyai kesadaran profesionalitas niscaya juga akan meningkatkan kualitas pekerjaannya, dan tidak sekadar bekerja sebagai petani yang cukup hidup asal tidak kelaparan.

Jika segenap masyarakat mempunyai kesadaran bahwa profesi adalah pekerjaan, maka sangat mungkin penilaian dan apresiasi terhadap pekerjaan apapun, tidak dilihat dari jenis pekerjaannya, melainkan dari hasil dan kualitas kerjanya. Penilaiannya semata-mata pada prestasi, dan bukan pada jenis pekerjaannya. Sebaliknya, masyarakat tidak perlu memberi penghargaan, bahkan jika mungkin, memberi sanksi sosial kepada siapapun yang bekerja tidak profesional dan melanggar norma agama, hukum, dan susila. Hakim, dokter, polisi, pengusaha, camat, gubernur, jika ada bagian dari pekerjaannya membodohi masyarakat, bukankah itu berarti mereka tidak bekerja secara profesional? Pada orang-orang yang seperti itu, mengapa pula kita harus tetap hormat dan memberi penghargaan? Bukankah mereka bekerja tidak profesional?

Kedua, melalui pemberian penghargaan pada prestasi hasil budaya dan pemikiran. Penghargaan pada hasil budaya akan memperkaya ruhani dan itu menyangkut persoalan moral dan hati nurani. Bukankah kekaguman kita pada kemegahan Candi Borobudur, pada kaligrafi yang tertulis pada bangunan masjid-masjid kuno, menumbuhkan rasa bangga yang kemudian menjalar pada rasa hormat kita pada prestasi para luhur? Demikian juga, kepiawaian dalang dalam memainkan wayang, kekompakan para penari Aceh yang meliuk-liuk, bergerak sama penuh keindahan dan daya pukau, atau para pemain akrobat yang tubuhnya begitu lentur

dan lincah, menumbuhkan kekaguman yang tanpa sadar menyelusup pada kesadaran kita untuk menghargai prestasi atas kerja keras. Banyak contoh dapat kita kemukakan. Dalam hal inilah pentingnya penghargaan pada prestasi budaya dapat menumbuhkan rasa cinta, kagum, bangga, dan memberi penyadaran bahwa prestasi menjadi sesuatu yang penting. Semua itu hanya dapat dicapai melalui kerja keras.

Ketiga, melalui pemberian penghargaan kepada karya-karya hasil pemikiran. Bukankah karya-karya dari buah pemikiran itu merupakan prestasi sebuah kreativitas? Dengan memberi apresiasi pada buah pemikiran, kita akan memberi tempat pada pemikiran apapun. Dalam konteks ini, penghargaan terhadap buah pemikiran akan melancarkan proses demokratisasi. Perbedaan pendapat tidak harus membawa perpecahan, tapi keberagaman. Semua itu berarti kekayaan.

Dalam konteks yang lebih khusus, buah pemikiran merupakan karya intelektual. Sejauh ini, sudah proporsionalakah kita menghargai karya-karya intelektual yang dihasilkan para pemikir kita? Jadi, penghargaan pada karya intelektual, tidak hanya akan memuluskan jalan pada penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan kreativitas seseorang, tetapi juga menciptakan kompetisi untuk memikirkan apapun untuk kemaslahatan bangsa dan umat manusia. Hanya melalui para pemikirilah, berbagai karya kreatif, akan bermunculan.

Keempat, melalui penumbuhan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, utamanya membaca buku dan menulis karangan. Bagaimanapun, peranan ilmu sebagai langkah untuk mencapai kemajuan dan mengejar ketertinggalan, mesti menjadi bagian wacana kehidupan sehari-hari. Ilmu harus ditempatkan sebagai kebutuhan ruhani yang primer. Dalam konteks SDM, ilmu adalah modal dasar untuk meningkatkan kualitas SDM. Hanya dengan ilmu, SDM akan menjadi *capital* (modal) yang mempunyai nilai lebih dan harga yang tinggi.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka penggalian ayat-ayat yang berkaitan dengan pentingnya ilmu harus menjadi bagian dari khutbah Jumat dan dakwah agama. Yang dimaksud ilmu dalam Quran, bukanlah sekadar ilmu akhirat, melainkan juga ilmu dunia yang justru penting sebagai bekal kehidupan akhirat. Hanya dengan ilmu, seseorang akan dapat meningkatkan derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu pula penghargaan kita kepada sesama manusia, kepada alam semesta, dan kepada Tuhan, justru akan meningkat. Dengan kesadaran itu, keberimanan kita juga akan meningkat.

Kelima, mengingat guru merupakan ujung tombak penyebarluasan ilmu pengetahuan, maka penghargaan pada guru yang terutama bukan pada pekerjaannya, melainkan pada profesinya. Secara profesional, kelompok guru adalah salah satu agen perubahan yang sangat penting. Maka, dia harus bekerja secara profesional, dan bukan bekerja secara rutin, monoton, dan klise. Guru yang profesional adalah

mereka yang setiap saat memperbaharui metode mengajarnya, menambah wawasan ilmu pengetahuannya, dan menyadari profesinya sebagai agen perubahan dan ujung tombak penyebarluasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, citra guru sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa," jelas merupakan pelecehan terhadap profesi guru. Guru adalah pahlawan yang justru harus diberi tanda jasa. Tanda jasanya, bisa berupa peningkatan kesejahteraan, peningkatan gaji, pemberian fasilitas untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya, atau memberi kebebasan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Harus ada kesadaran profesional bahwa pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas diri dan tanggung jawab terhadap profesi.

Perlihatkan siapakah yang memulai menumbuhkan kesadaran nasional bangsa ini? Haji Agus Salim, Wahidin Sudirohusodo, Ki Hadjar Dewantara, Abdul Muis, Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, Abdullah Hinduan, AR Baswedan, Sutan Takdir Alisjahbana, Muhammad Natsir, Hasyim Asy'ari, Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, dan sederetan nama para tokoh pergerakan kita adalah guru, mantan guru, atau sangat menjunjung tinggi peranan guru. Merekalah yang tiada henti menyebarluaskan arti pendidikan bagi bangsa pribumi. Jadi, penghargaan terhadap guru, dunia pendidikan, dan ilmu pengetahuan, harus menjadi bagian integral dari usaha kita mengangkat martabat, meningkatkan kualitas, dan mengejar ketertinggalan kita sebagai sebuah bangsa. Di sanalah peranan guru menjadi sangat menentukan.

Itulah paradigma baru dalam usaha mengangkat SDM kita.

G. Penutup

Bagaimanakah paradigma itu dikaitkan dengan Sistem Pendidikan Nasional kita? Sistem apapun, kurikulum macam apapun, metode pengajaran model apapun, pada hakikatnya hanyalah sarana. Ia ibarat kendaraan yang sopirnya adalah guru. Masalahnya kini, kendaraan yang luar biasa hebatnya, jika sopirnya tak mempunyai pengetahuan untuk menjalankannya, ia akan tetap menjadi sebuah kendaraan yang sekadar indah dipandang mata. Jadi, sistem apapun, muaranya tetap jatuh pada kepiawaian guru. Di sinilah, profesionalitas guru penting artinya untuk menjalankan kendaraan yang bermuatan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, guru yang piawai dan menguasai ilmu pengetahuan secara mumpuni, niscaya tidak bakal terlalu repot menjalankan kendaraan itu, karena dia dapat menyiasati sendiri sejauh ia tidak menyimpang dari profesionalitasnya sebagai guru.

Bahwa diperlukan adanya sistem pendidikan nasional, tentu saja itu penting. Bahwa muncul apa yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi, tentu saja itu juga penting. Tetapi, ia akan tetap menjadi masalah menggantal jika kualitas gurunya sendiri terabaikan. Oleh karena itu, kini cara berpikir kita harus dengan cara pandang baru, yaitu memutar fokus lensa kamera kita lebih tajam terhadap kualitas guru dan

menempatkan pekerjaan guru secara profesional. Semboyan “guru pahlawan tanpa tanda jasa,” harus disingkirkan jauh-jauh, dan diganti dengan “guru pahlawan yang harus diberi tanda jasa” yang seperti dinyatakan tadi, dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitasnya. Pasukan paling depan dalam formasi pertempuran mengatasi kebodohan ini adalah guru.

Pencucian citra SDM warisan kolonial ini tidak akan mudah. Akibat kerusakan yang ditinggalkannya luar biasa. Kita harus mempercepat waktunya, sebelum sangat terlambat. Kita harus bersedia menata bersama cara pandang baru SDM kita, yang bermartabat, bagi bangsa benar-benar memberi manfaat dan di bawah naungan ridhanya